
UPAYA PEMERINTAH REPUBLIK PALAU DALAM MENANGANI ANCAMAN PERUBAHAN IKLIM TAHUN 2015-2020

Nurul Izza Desliana¹

Abstract: *This research aims to determine the behavior of the government of the Republic of Palau in dealing with the threat of climate change from 2015 to 2020. The data was collected using both primary and secondary sources under the umbrella of qualitative research. The results of this research is by taking securitization actions. The actions were carried out through internal and external efforts, such as: engaging in bilateral cooperation with the United States, New Zealand, and Japan; actively participating in the Conferences of Parties (COP) by the UNFCCC; and implementing international environmental commitments.*

Keywords: *Climate Change, Republic of Palau, Securitization*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perilaku pemerintah Republik Palau dalam menghadapi ancaman perubahan iklim dari tahun 2015 hingga 2020. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan sumber primer dan sekunder dengan payung penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah dengan melakukan tindakan sekuritisasi. Tindakan tersebut dilakukan melalui upaya internal dan eksternal, seperti: menjalin kerja sama bilateral dengan Amerika Serikat, Selandia Baru, dan Jepang; berpartisipasi aktif dalam Konferensi Para Pihak (COP) oleh UNFCCC; dan menerapkan komitmen lingkungan internasional.

Kata Kunci: *Perubahan Iklim, Republik Palau, Sekuritisasi*

Pendahuluan

Perubahan iklim menjadi salah satu fenomena yang sedang menjadi perhatian dunia. Sejak terjadinya kemajuan di bidang industri di tahun 1980-an membuat peningkatan aktivitas manusia dengan menggunakan bahan bakar fosil menjadi meningkat. Hal ini menyebabkan terjadinya penipisan dan kerusakan lapisan ozon yang menimbulkan pemanasan suhu bumi atau pemanasan global (Climate Gov, 2022). Akibat dari pemanasan global, mempengaruhi kenaikan permukaan air laut mencapai 3,3mm pertahunnya (NASA, 2022). Akibat hal ini ilmuwan dan komunitas global mencoba mengambil beberapa tindakan salah satunya dengan membuat perjanjian yang berfokus pada isu lingkungan internasional. Terdapat beberapa perjanjian lingkungan internasional seperti *Montreal Protocol*, *Kyoto Protocol* dan *Paris Agreement*.

Secara Global, kenaikan permukaan air laut kenaikan yang terjadi sejak tahun 1993 hingga 2020 telah mencapai 94mm atau 3,3mm pertahun dan jika dihitung perabad kenaikan permukaan air laut mencapai 30cm (NASA, 2022). Hal ini membuat pulau atau atoll daratan rendah dan pegunungan di Kepulauan Pasifik mulai terancam diakibatkan meningkatnya permukaan air laut dengan cepat. Kenaikan permukaan air laut ini sangat memberikan pengaruh terhadap negara-negara kepulauan kecil di Pasifik salah satunya Republik Palau. Republik Palau merupakan negara kepulauan kecil di Mikronesia yang terletak di bagian barat Samudra Pasifik berdekatan dengan Indonesia dan

¹ Mahasiswa Program S1 Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. E-mail : nurulizzadslana17@gmail.com

Filipina. Republik Palau memiliki luas wilayah 459km² dengan memiliki 340 pulau, 8 pulaunya berpenghuni dengan 16 negara bagian (Palau Government, 2022).

Kondisi geografis ini membuat Palau rentan terhadap ancaman perubahan iklim. Terjadinya peningkatan suhu udara menjadi lebih panas, topan dan badai yang lebih kuat, tingkat curah hujan yang menjadi lebih ekstrim merupakan dampak dari perubahan iklim yang terjadi di Palau. Pemanasan global yang terjadi memberikan efek domino terhadap aspek-aspek kehidupan di Palau, seperti naiknya suhu air laut menyebabkan pemutihan karang dan ikan-ikan bermigrasi ke perairan yang lebih dingin sehingga terjadi kerusakan ekosistem laut.

Hal ini akan mempengaruhi ketahanan pangan dan sumber perekonomian masyarakat setempat. Selain itu dalam sektor pertanian, cuaca yang menjadi sangat panas serta naiknya permukaan air laut ke daerah perkebunan membuat tanaman talas yang merupakan makanan pokok masyarakat Palau mengalami gagal panen. Bagi masyarakat negara kepulauan, perubahan iklim bukan hanya tentang kenaikan permukaan air laut dan suhu, namun juga tentang keamanan dan keselamatan masyarakat yang berada di negara ini. Hal ini diperkuat dengan adanya penelitian dari *Palau International Coral Reef Center* dan *Ingovernmental Panel on Climate Change* (Palau Government, 2015).

Tulisan ini adalah sebuah upaya untuk menjelaskan perilaku pemerintah Republik Palau sebagai negara kepulauan kecil dalam menangani ancaman perubahan iklim di Republik Palau dalam rentang waktu dari tahun 2015 sampai 2020 dan mendeskripsikan dampak dari perubahan iklim yang mengancam kehidupan seluruh umat manusia termasuk masyarakat Republik Palau.

Kerangka Teori

Penelitian ini menggunakan dua teori, yaitu teori sekuritisasi dan teori environmentalisme sebagai unit analisis penelitian.

1. Teori Sekuritisasi

Menurut Barry Buzan, gagasan keamanan tidak hanya berkaitan dengan kedaulatan negara yang menggunakan kekuatan militer. Namun, keamanan juga mencakup ancaman non-militer. Studi non-militer ini disebut juga sebagai *Non-Traditional Security* (Agus Trihartono et.al, 2020). Dalam studinya, keamanan non-tradisional mencakup tiga sektor yaitu sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dalam hal ini, maka ancaman terhadap *referent objects* dapat berupa militer maupun non-militer sehingga dibutuhkannya sekuritisasi. Sekuritisasi dapat didefinisikan sebagai salah satu proses yang dilakukan oleh beberapa aktor ketika suatu yang bukan ancaman menjadi ancaman eksistensial (Barry Buzan et.al, 1998).

Barry Buzan mengungkapkan dalam teori sekuritisasi terdapat beberapa hal yang mencakup dalam proses sekuritisasi, yaitu (Barry Buzan et.al, 1998):

- 1) *Securitizing actors*, aktor yang melakukan *speech act* kepada *audiences*
- 2) *Speech Act*, gagasan yang merupakan tindak tutur dari sekuritisasi yang menempatkan suatu obyek menjadi isu keamanan yang harus diselamatkan
- 3) *Existential threat*, sesuatu hal yang dianggap perlu dilindungi sebagai *referent objects* dan terancam secara nyata.
- 4) *Audiences*, pihak yang menerima dan meyakini bahwa adanya *existential threat*

Dalam sektor lingkungan terdapat dua *referent objects* yaitu pertama lingkungan saja, kedua peradaban dan lingkungan. Terdapat tiga prinsip hubungan ancaman dalam

keamanan lingkungan, yaitu (Barry Buzan et.al, 1998): Pertama, ancaman yang berkaitan dengan peradaban manusia namun tidak disebabkan oleh aktivitas manusia. Kedua, ancaman terhadap sistem alam yang disebabkan aktivitas manusia sehingga menimbulkan ancaman eksistensial. Ketiga, ancaman dari aktivitas manusia yang mempengaruhi sistem alam namun tidak menimbulkan ancaman eksistensial.

Menurut Buzan, peningkatan aktivitas manusia mulai mempengaruhi kondisi kehidupan di bumi. Dalam lingkup kecil, suatu ancaman lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas manusia di suatu negara yang memberikan efek ke negara lain. Namun, dalam lingkup besar ancaman ini dapat berupa fenomena global seperti *global warming*. Jika ancaman ini terjadi secara substansial maka beberapa negara akan menanggung akibat dari ancaman fenomena global (Barry Buzan et.al 1991).

2. Teori Environmentalisme

Environmentalisme muncul sebagai suatu paradigm yang bergerak dari *Green Movement* yang menerima struktur politik, sosial, dan ekonomi dunia guna memperbaiki kerusakan lingkungan yang ada dengan menggunakan struktur tersebut. Environmentalisme memiliki pandangan yang berfokus pada manusia atau antroposentrisme (Matthew Patterson, 2005). Environmentalisme percaya akan kerjasama internasional dapat menyelamatkan dunia dari isu kerusakan lingkungan hal ini berkaitan dengan antroposentrisme yang mana dunia berpusat pada manusia dan sifat-sifat kemanusiaan, atau singkatnya environmentalisme percaya terhadap komunitas internasional dalam memecahkan permasalahan lingkungan (Tayyar Ali, 2019).

Menurut Lester Milbrath terdapat beberapa prinsip environmentalisme, yaitu (Lester Milbrath, 1986) :

- 1) Alam memiliki nilai yang tinggi
- 2) Mempunyai rasa simpati terhadap sesama, generasi selanjutnya dan semua makhluk hidup yang ada di bumi termasuk flora dan fauna
- 3) Terdapat penekana yang lebih besar dalam pemberian kepuasan pekerja
- 4) Pertumbuhan yang terbatas
- 5) Merupakan pola sosial baru
- 6) Peranan partisipasi, kerjasama dan hidup sederhana menjadi suatu hal yang lebih dihargai
- 7) Solusi pribadi tidak menjadi fokus utama, lebih menghargai solusi publik
- 8) Menghindari teknologi yang sensitif terhadap lingkungan dengan merancang perencanaan yang jelas

Environmentalisme memberikan paham bahwa eratnya hubungan antara kepedulian manusia terhadap lingkungan hidup untuk menciptakan kestabilan sumber daya alam keberlanjutan dengan menjalankan kebijakan publik. Maka dari itu, diperlukan kerjasama yang kuat antara pemerintah dan masyarakat guna melindungi alam. Di sisi lain, lingkungan juga berfungsi sebagai pendorong perekonomian negara untuk mempertahankan kehidupan manusia.

Dalam mempertahankan kehidupan, manusia harus memiliki pemahaman bahwa lingkungan tidak hanya menjadi alat yang dapat digunakan secara terus-menerus tanpa adanya penjagaan dan pemeliharaan sumber daya alam. Environmentalisme juga menekankan pada dua hal mendasar, yaitu *sustainability* (keseimbangan) dan *accountability of resouces* (pertanggung jawaban). Hal ini yang menjadi dasar pemikiran dalam penggunaan sumber daya alam dengan bijak (Yeni Sri Lestari, 2019).

Metode Penelitian

Penelitian ini mendeskripsikan perubahan iklim global yang berdampak serius terhadap kehidupan seluruh umat manusia termasuk masyarakat di negara Palau dan menjelaskan perilaku pemerintah Republik Palau dalam menangani dampak perubahan iklim tersebut. Dalam penelitian ini data yang digunakan data kualitatif dengan mengambil dari sumber primer maupun sekunder. Keseluruhan data yang dimaksud akan ditelusuri secara elektronik dengan mengakses sumber-sumber terpercaya, seperti: situs resmi, jurnal dan artikel. Teknik yang diambil yaitu mengelaborasi data kemudian menggolongkan data sesuai dengan kebutuhan penelitian, lalu disajikan berupa sebuah teks narasi secara urut dan sistematis yang kemudian menjadi unit dasar analisis.

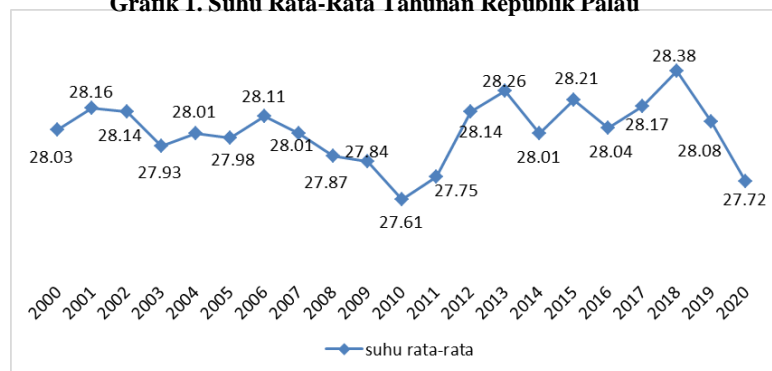
Hasil dan Pembahasan

A. Perubahan Iklim di Republik Palau

Republik Palau merupakan salah satu negara kepulauan kecil yang tereletak di Oceania dengan sub-regional Mikronesia dikarenakan luas wilayah daratan Republik Palau hanya 549km². Republik Palau memiliki 340 pulau termasuk delapan pulau berpenghuni mulai dari Timur Laut ke Barat daya: Kayangel, Babeldaob, Koror, Peliliu, Angaur, Sonsorol, Pulo Anna, dan Hatohobei, Dan untuk luas wilayah perairannya termasuk dengan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sebesar 237.850 mil persegi (Palau Government, 2022). Total populasi Republik Palau mencapai 18.174 jiwa dengan Koror menjadi negara bagian terpadat yaitu 70% atau 11.400 jiwa menempati wilayah ini (United Nations, 2021).

Sebagai negara tropis Republik Palau memiliki iklim yang panas dan lembab dengan suhu rata-rata tahunan saat ini 28.3°C, dan 82% rata-rata kelembabannya. Antara suhu terpanas dan terdingin memiliki perbedaan 0.8°C. Republik Palau memiliki dua musim, musim hujan berlangsung dari bulan Mei sampai Oktober, curah hujan terbesar biasanya terjadi di bulan Juni dan Agustus, musim kemarau terjadi di bulan November hingga April (Climate Change Knowledge Portal, 2021). Kemudian, peristiwa *El Nino Southern Oscillation* (ENSO) yaitu pergeseran atmosfer samudra di Pasifik tropis secara periodik yang mempengaruhi cuaca di seluruh dunia terjadi secara teratur di Republik Palau. Siklusnya yaitu 3-7 tahun namun rata-ratanya setiap lima tahun dengan masa berlangsung sembilan bulan hingga dua tahun (NOAA, 2015) .

Grafik 1. Suhu Rata-Rata Tahunan Republik Palau



Sumber: Climate Change Knowledge Portal

Berdasarkan grafik di atas, suhu rata-rata tahunan selama 20 tahun di Republik Palau dari tahun 2000-2020 mengalami perubahan. Suhu rata-rata tahunan di tahun 2000 pertama kali mencapai 28.3°C yang mana sebelumnya lebih banyak hanya mencapai

26°C-27°C, kemudian dari tahun 2008 menurun menjadi 27.87°C dan mengalami kenaikan kembali di tahun 2013 mencapai 28.26°C. di tahun 2020 kembali mengalami penurunan menjadi 27.72°C (Climate Change Knowledge Portal, 2021). Hal ini menimbulkan peningkatan jumlah hari panas di Koror menjadi 100 hari/tahun yang sebelumnya di bawah 100 hari. Kemudian, malam dingin di Koror menurun menjadi di bawah 20 hari/tahun yang sebelumnya 40 hari/tahun (Miles W et.al, 2020).

Bagi negara-negara kepulauan kecil di Pasifik curah hujan merupakan sumber utama dari semua air tawar yang berada di pulau-pulau dan memiliki pengaruh yang sangat penting bagi ekosistem dan masyarakat negara kepulauan salah satunya di Republik Palau. Republik Palau bergantung terhadap curah hujan dalam ketersediaan air tawar dikarenakan mayoritas wilayah perairannya merupakan air asin. Namun, pola curah di Republik Palau sangat terkait dengan peristiwa ENSO.

Tercatat di tahun 2015 curah hujan Republik Palau merupakan yang terendah sehingga menyebabkan kekeringan berkepanjangan dari tahun 2015 – 2016. Hal ini dibuktikan dengan mengeringnya sungai Ngeriliik yang menjadi sumber pasokan air publik mengalami penurunan yang hanya menghasilkan 19% dari produksi normal yaitu 3,8 juta GPD (*Gallons Per Day*) sehingga ketinggian air menjadi sangat rendah. Pemerintah Republik Palau menjadikan status darurat nasional dan meminta bantuan *supply* air bersih (Palau Government, 2017).

Republik Palau juga mengalami bencana angin topan dan akibat dari perubahan iklim akan membuat frekuensi bencana badai dan angin topan meningkat. Akibat kerentanan terhadap peristiwa angin topan dan badai Republik Palau mencatat sejak tahun 1945 telah terjadi 68 topan, dan di tahun 2012-2013 menjadi peristiwa angin topan yang memberikan dampak yang cukup besar (Centre for Excellence in Disaster Management and Humanitarian Assistance, 2020).

Tabel 1. Angin Topan dan Badai Terparah di Republik Palau

Angin Topan	Tahun	Wilayah yang terdampak	Kerusakan
Topan Bopha	2012	Angaur, Paleliu, Ngchesar, Melekeok, Ngiwal, dan Ngaraad	112 rumah hancur total, 136 rumah dengan kerusakan rusak berat
Topan Haiyan	2013	Kayanggel, Ngcerchelong, Ngaraad, Ngardmau, dan Koror	39 rumah rhancur total, 376 rumah mengalami kerusakan parah
Topan Surigae	2021	Angaur, Paleliu, Kayangel dan Koror	150 rumah hancur, sekita 1.500 rumah menalami kerusakan berserta harta benda dan lahan pertanian

Sumber: OCHA dan IFRC

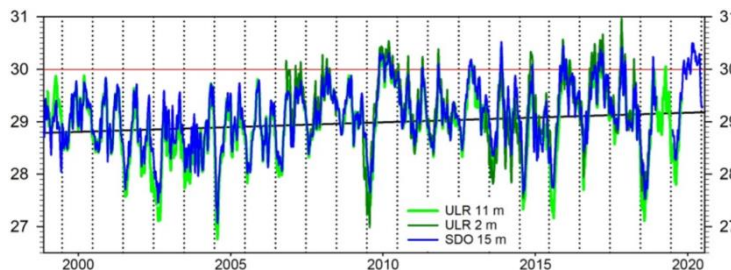
Tabel di atas merupakan bencana angin topan dan badai yang cukup memberikan dampak yang besar terhadap Republik Palau. Di tahun 2012 Topan Bopha membuat Presiden Toribiong Johnsonn selaku Presiden Republik Palau mengatakan keadaan darurat dan meminta pendaan kepada Kongres Nasional Palau sebesar 10 juta US dollar untuk upaya bantuan dan pemulihan (OCHA, 2012). Kemudian, Topan Haiyan yang terjadi di tahun 2013 pemerintah Republik Palau melakukan penjataan air selama seminggu. Presiden Republik Palau juga menandatangani Deklarasi Keadaan Darurat dan Undang-Undang Pendanaan Darurat Topan Super (Internation of Federation Red Cross and Red Crescent Societies, 2013).

Di tahun 2021, kembali terjadi badai dan angina topan yang memberikan dampak besar di Republik Palau. menurut *The National Oceanic Atmospheric*

Administration (NOAA), Topan Surigae merupakan salah satu topan yang kuat dan intens terjadi, badai juga menghasilkan gelombang setinggi 23 meter. Total pendanaan untuk bencana ini sebesar 318.551 US dollar (Internation of Federation Red Cross and Red Crescent Societies, 2022).

Peristiwa El Nino dan La Nina juga mempengaruhi suhu permukaan air laut. Umumnya pemutihan karang dikaitkan dengan peristiwa La Nina yang membawa air yang lebih hangat ke perairan Republik Palau. Di Republik Palau, suhu laut terpanas terdapat di Angaur, Melekeok dan Koror dengan rata-rata suhu laut saat ini 32.6°C dan mengalami kenaikan suhu laut rata-rata 0,2°C perdekade sejak tahun 1999 (Miles W et.al, 2020).

Grafik 2. Rata-Rata Suhu Air Laut di Republik Palau

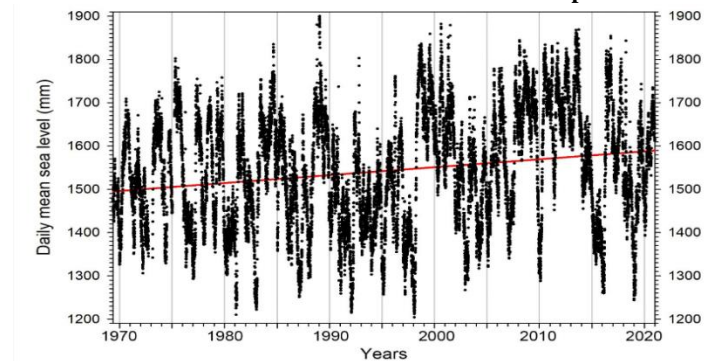


Sumber: International Coral Reef Research Foundation

Berdasarkan gambar grafik suhu air laut dibagi menjadi tiga warna, pertama suhu dangkal dengan kedalaman 2 meter ditandai dengan warna hijau tua, suhu air dengan kedalaman 11 meter ditandai warna hijau muda dan suhu air terdalam yaitu 15 meter ditandai dengan warna biru. Terdapat garis hitam yang menunjukkan suhu air laut di Republik Palau mengalami peningkatan 0,2°C-0,3°C selama 20 tahun terakhir terhitung dari tahun 2000 sampai 2020. Sejak 2010, suhu air laut dimulai dari garis berwarna hijau tua yang merupakan suhu dangkal mencapai suhu di atas 30°C. Kemudian suhu air laut dengan kedalaman 11 meter dan 15 meter perlahan mulai mencapai garis merah sehingga suhu air pada tingkat kedalaman yang lebih dalam dari suhu dangkal juga ikut menghangat dan kenaikan ini akan mengakibatkan pemutihan karang (Climate Change Knowledge Portal, 2021).

Permukaan laut juga mengalami kenaikan yang akan mengancam perubahan fisik pada zona pesisir. Wilayah Republik Palau sebagian besar terletak 9 meter di atas permukaan laut dan wilayah dataran tinggi tidak optimal untuk lahan pertanian, perkebunan maupun pemukiman manusia dikarenakan berbukit sehingga masyarakat Republik Palau mendiami wilayah daratan rendah pesisir (The World Bank Group and The Asian Bank Development, 2021).

Grafik 3. Rata-Rata Permukaan Air Laut Harian Republik Palau



Sumber: International Coral Reef Research Foundation

Berdasarkan garis grafik berwarna hitam terdapat garis horizontal berwarna merah yang menunjukkan dalam waktu 60 tahun terakhir Republik Palau mengalami kenaikan permukaan air laut 3mm pertahunnya. Jika dilihat dari garis angka secara vertikal di bagian kanan dan kiri, permukaan air laut berawal dari 1.500 mm di tahun 1970 perlahan naik menjadi 1.600 mm pada tahun 2020. Perubahan permukaan air laut yang lebih tinggi dapat menyebabkan berkurangnya luas wilayah daratan di Republik Palau dan memunculkan beberapa bencana seperti erosi pantai yang lebih sering, banjir pantai, intrusi air asin ke akuifer air tawar dan kerusakan ekosistem laut (Coral Reef Research International, 2021).

B. Sekuritisasi Perubahan Iklim di Republik Palau

Pemerintah Republik Palau memiliki *concern* terhadap isu perubahan iklim. Untuk menganalisis tentang upaya pemerintah Republik Palau dalam menangani perubahan iklim, maka digunakan teori sekuritisasi sebagaimana yang telah dirancang oleh Mahzab *Copenhagen School*. Terdapat beberapa formula penting dalam proses sekuritisasi, yaitu: *securitizing actor*, *speech act*, *existential threat* dan *audiences*.

Tabel 2. Proses Sekuritisasi Perubahan Iklim di Republik Palau

<i>Securitizing Actors</i>	<i>Speech Act</i>	<i>Existential Threat</i>	<i>Audiences</i>
Pemerintah Republik Palau	Perubahan Iklim yang mereduksi wilayah daratan Republik Palau	<ol style="list-style-type: none"> 1. Suhu air laut dan permukaan air laut meningkat 2. Temperatur suhu udara meningkat menyebabkan cuaca ekstrim 3. Peristiwa ENSO yang meningkat dapat mempengaruhi peningkatan bencana alam 	Masyarakat lokal Republik Palau dan masyarakat internasional

Sumber: dikelola oleh penulis

Berdasarkan tabel di atas, pemerintah Republik Palau digolongkan sebagai *securitizing actors*. Peran ini biasanya dilakukan oleh petinggi dunia, seperti pemimpin politik, pemerintah maupun non-pemerintah. *Securitizing actors* menjadi pihak yang dapat menyatakan sesuatu yang bukan ancaman menjadi sebuah isu keamanan. Kemudian, *securitizing actors* akan melakukan *speech act* dimana dalam penelitian ini sebuah isu lingkungan diartikulasikan menjadi isu keamanan, pemerintah Republik Palau telah mentransformasikan isu perubahan iklim menjadi sebuah isu keamanan bagi negaranya. Hal ini yang kemudian digaungkan oleh pemerintah Republik Palau secara berulang dengan memberikan bukti bahwa kenaikan permukaan air laut, peningkatan suhu udara maupun suhu air laut yang mempengaruhi peningkatan siklus ENSO menjadi sebuah *existential threat* bagi Republik Palau. Sehingga, pemerintah Republik Palau meyakinkan *audiences* bahwa perubahan iklim menjadi isu yang berbahaya bagi keberlanjutan hidup masyarakat maupun negara Republik Palau. *Audiences* dalam proses ini meliputi masyarakat Republik Palau dan masyarakat internasional.

C. Upaya Pemerintah Republik Palau Dalam Menangani Ancaman Perubahan Iklim Tahun 2015-2020

Dalam proses mensekritisasi negaranya, pemerintah Republik Palau mengambil beberapa tindakan sebagai upaya mengamankan negaranya dari ancaman perubahan iklim. Maka dari itu, pemerintah Republik Palau dan beberapa mitra telah melakukan sejumlah inisiatif untuk mengatasi resiko dengan melakukan kontribusi dalam perencanaan adaptasi serta mitigasi perubahan iklim. Beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah Republik Palau dalam bentuk upaya internal maupun eksternal.

1. Upaya Internal

Sebagai negara yang rentan terhadap perubahan iklim, pemerintah Republik Palau melakukan beberapa tindakan internal yang sesuai dengan kondisi lingkungan dan masyarakat di Republik Palau. Beberapa upaya internal yang dilakukan, yaitu:

- a) Menetapkan Undang-Undang Lingkungan Nasional Republik Palau, yaitu: *Environmental Quality Act, Palau Energy Act dan Palau Administration Regulatory*. Undang-Undang ini sebagai bentuk adaptasi lingkungan Republik Palau menyesuaikan dengan keadaan kondisi saat ini. Undang-undang ini juga mengatur perlindungan lingkungan secara estetika dan melakukan pembangunan sosial-ekonomi yang berkelanjutan dalam mencapai tujuan dari rakyat Republik Palau (Palau Government, 2018).
- b) Menetapkan Kebijakan *National Food Security* dan *Palau Climate Change Policy*, kebijakan ini ditujukan sebagai bentuk pertahanan pangan dengan pengembangan pertanian dan akuakultur yang disebarluaskan kepada petani lokal dalam menjamin pangan yang aman (Palau Government, 2015). Kemudian, *Palau Climate Change Policy* menjadi salah satu pemenuhan komitmen Republik Palau terhadap UNFCCC. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi kerentanan Republik Palau terhadap perubahan iklim dan meningkatkan strategi dan koordinasi nasional dalam menghadapi tantangan dari dampak perubahan iklim (Palau Government, 2015).
- c) Pemerintah Republik Palau memberlakukan *Palau National Marine Sanctuary* sebagai bentuk upaya pelestarian sumber daya lingkungan dan perlindungan keanekaragaman hayati termasuk 800 spesies hewan dan membantu sumber daya laut Republik Palau lebih tahan terhadap perubahan iklim (Palau International Coral Reef Center, 2019).
- d) Pemerintah Republik Palau mengadakan pelatihan *Community Based of Disaster Risk Reduction* (CBDRR) yang bertujuan untuk membekali langkah-langkah bagi masyarakat secara individu dalam keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk meningkatkan keamanan dan ketahanan pada saat bencana (Palau Government, 2016).

2. Upaya Eksternal

Pemerintah Republik Palau juga melakukan beberapa upaya eksternal dengan tujuan menyuarakan tentang kondisi yang dialami oleh negara-negara kepulauan kecil kepada masyarakat internasional dan komunitas global bahwa negara-negara di Kepulauan Pasifik salah satunya Republik Palau membutuhkan bantuan dan dukungan secara bersama dalam memerangi ancaman perubahan iklim. Beberapa upaya eksternal yang dilakukan, yakni:

- a) Menjalin kerjasama bilateral bersama beberapa negara, seperti Amerika Serikat dengan melakukan kerjasama NREL sebagai bentuk dukungan dari pemerintah Amerika Serikat dalam penggunaan energi terbarukan (U.S Department of Energy, 2016). Kemudian, menjalin kerjasama dengan Jepang yaitu pembuatan *the Project for Improvement of Water Supply System bersama Palau Public Utilities Corporation (PPUC)* sebagai badan pelaksana proyek ini dari pihak pemerintah Republik Palau (Japan International Cooperation Agency, 2015). Dan, kerjasama pemasangan pemasangan grid yang menghubungkan panel *solar photovoltaic* ke jaringan PCC bersama Selandia Baru (islandtimes.org, 2018).
- b) Setelah merdeka pemerintah Republik Palau bergabung dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan mulai berperan aktif dalam menjalankan komitmen sebagai negara anggota. Di tahun 1999, pemerintah Republik Palau meratifikasi *Kyoto Protocol* yang disusul pada tahun 2001 meratifikasi *Montreal Protocol*. Kemudian, di tahun 2016 meratifikasi *Paris Agreement* dengan melakukan komitmen dalam bentuk *Intended Nationally Determined Contributions (INDC)* setiap 5 tahun sekali (UNFCCC, 2022).
- c) Republik Palau bergabung dalam organisasi antar pemerintah negara-negara yang memiliki tujuan yang sama, yaitu menciptakan kestabilan lingkungan, mengurangi emisi gas rumah kaca dan melakukan *climate action*. Seperti yang telah disebutkan di atas, Republik Palau bergabung dalam AOSIS, SPREP, PIF, dan UNFCCC sebagai bentuk keterlibatannya dalam forum internasional. Selain itu, Pemerintah Republik Palau juga berperan secara aktif dalam COP yang rutin diselenggarakan setiap tahunnya. Keterlibatan Republik Palau dalam COP21, COP23 dan COP26 (UNFCCC, 2022).

Kesimpulan

Perubahan iklim merupakan isu lingkungan yang kemudian bertransformasi menjadi sebuah isu keamanan. Dampak-dampak yang ditimbulkan dari perubahan iklim mempengaruhi negara-negara kepulauan kecil Pasifik salah satunya yaitu Republik Palau. Bagi masyarakat Republik Palau, perubahan iklim yang terjadi bukan hanya tentang penipisan lapisan ozon dan kenaikan permukaan air namun telah menjadi ancaman lingkungan dan peradaban manusia di negara Republik Palau.

Akibat dari perubahan iklim, membuat pemerintah Republik Palau harus mengambil tindakan yang tepat dalam mengamankan negaranya. Kemudian, pemerintah Republik Palau melakukan sekuritisasi terhadap negaranya. Upaya yang dilakukan sebagai *securitizing actors*, menghasilkan beberapa tindakan mitigasi serta adaptasi melalui kebijakan yang berlaku secara internal maupun upaya eksternal. Sehingga, dapat diperoleh kesimpulan bahwa upaya yang dilakukan oleh pemerintah Republik Palau sebagai aktor sekuritisasi dalam menangani ancaman perubahan iklim melalui *speech act* dalam teori sekuritisasi telah berhasil dengan meyakinkan *audiences* yaitu masyarakat lokal Republik Palau dan masyarakat internasional.

Daftar Pustaka

Ali, Tayyar dan Fatih Bilal Gokpinar dalam Tayyar Ari dan Elif Toprak. “*Theories of International Relations II.*” Turkey: Anadolu University Press, 2019

- Buzan, B. *“People, States and Fear”*. London : Lynne Rienner, 1991
- Buzan, B., Waever, O., de Wilde, J. *“Security – A New Framework for Analysis”*. London : Lynne Rienner, 1998.
- Centre for Excellence in Disaster Management and Humanitarian Assistance. *“Palau Disaster Management Handbook”*. Hawaii. 2020.
- Climate Change Knowledge Portal. *“Climatology in Palau”*. <https://climateknowledgeportal.worldbank.org/country/palau/climate-data-historical>
- Climate.gov. *“Climate Change: Global Temperature”*. <https://www.climate.gov/news-features/understanding-climate/climate-change-global-temperature>
- Coral Reef Research International Foundation. *“Climate Change in Palau”*. <https://coralreefpalau.org/projects/climate-change-in-palau/>
- Government of Palau. *“Achieving Resilient Agriculture and Aquaculture in Palau: A National Policy for Strengthening Food Security in Palau as a Priority Climate Change Adaptation Measure”*. Koror, Palau: Palau Gov. 2015
- Government of Palau. *“Palau Climate Change Policy for Climate and Disaster Resilient Low Emissions Development”*. Koror, Palau: Palau Gov. 2015..
- International of Federation Red Cross and Red Crescent Societies. *“Information Bulletin Palau: Typhoon Haiyan No. 1”*. 2013.
- International of Federation Red Cross and Red Crescent Societies. *“DREF Final Report Palau: Typhoon Surigae”*. 2021.
- Island Times. *“\$17M Water Supply Systems Improvement Project Opened”*. <https://islandtimes.org/17-m-water-supply-system-improvement-project-opened/>
- Japan International Cooperation Agency. *“The Preparatory Survey Report on the Project for Improvement of Water Supply Systems”*. Japan. 2015.
- Lestari, Yeni Sri. *“Environmentalism dan Green Politics : Pembahasan Teories, Vol.2”*. Universitas Teuku Umar, 2016
- Miles, W., Z. Grecni, E. Matsutaro, P. Colin, V. Keener, Y. Golbuu, et al. *“Climate Change in Palau: Indicators and Considerations for Key Sectors. Report”*. Honolulu, HI: East-West Center. 2020.
- NASA. *“Sea Level”*. <https://climate.nasa.gov/vital-signs/sea-level/>
- NOAA. *“El Nino and its Impacts on the Republic of Palau”*. https://www.weather.gov/media/peac/one_pagers/El%20Nino%20Impacts%20on%20Palau.pdf
- OCHA. *“Palau: Typhoon Bopha Situation Report NO. 3”*. <https://reliefweb.int/report/palau/palau-typhoon-bopha-situation-report-no-3-11-december-2012>
- Palau Government.pw. *“Physical Features”*. <https://www.palau.gov.pw/executive-branch/ministries/finance/budgetandplanning/physical-features/>
- Palau Government.pw. *“Environment Quality Protection Board”*. <https://www.palau.gov.pw/eqpb/>
- Palau Government.pw. *“Drought Report Republic of Palau”*. <https://www.palau.gov.pw/wp-content/uploads/2017/06/Drought-Report-Final.pdf>
- Palau International Coral Reef Center and the Stanford Center for Ocean Solutions, *“Palau’s National Marine Sanctuary: Managing Ocean Change and Supporting Food Security”*. PICRC. 2019.

- Paterson, Matthew. *“Green Politics. In Theories of International Relations (3rd ed.)”*. New York: Palgrave Macmillan, 2015.
- The World Bank Group and The Asian Bank Development. *“Climate Risk Country Profile: Palau”*. Washington DC, 2021.
- Trihartono, Agus., Indriastuti, Suyani., Nisya, Chairun. *“Keamanan dan Sekuritisasi dalam Hubungan Internasional”*. Melvana Publishing, Jawa Barat, 2020.
- U.S Departement of Energy. *“The Republic of Palau: Pursuing a Sustainable and Resilient Energy Future”*. <https://www.nrel.gov/docs/fy16osti/65986.pdf>
- UNFCCC. *“Nationally Determined Contributions (NDCs)”*. <https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/nationally-determined-contributions-ndcs/nationally-determined-contributions-ndcs>
- United Nations. *“UN Population Division Data Portal”*. <https://population.un.org/wpp/Graphs/Probabilistic/POP/TOT/585>